



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR 923/I/IX/2016

**DPR RI Minta Pemerintah  
Siapkan Rencana Alternatif**

**Kritik Lewat Seni Fotografi  
Demi Perbaikan Kinerja Parlemen**

**DPR RI Terus Perkuat Lembaga  
Menuju Parlemen Modern**



**GRATIS**  
Tidak Diperjualbelikan

# DPR RI Minta Pemerintah Siapkan Rencana Alternatif

Pemerintah diminta untuk mempersiapkan rencana alternatif pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, khususnya bila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target. Selain itu, pemerintah juga harus dapat mengantisipasi kendala di lapangan terkait pemberlakuan program pengampunan pajak.

“Harus ada rencana strategis dan alternatif seandainya target tersebut tidak tercapai,” kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBN 2017 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Politisi F-PAN itu juga mengingatkan pemerintah bahwa format program pengampunan pajak adalah untuk membawa masuk dana yang ada di luar negeri. Jadi bukan untuk mengejar dana dari wajib pajak dalam negeri.

“Mengapa muncul kesan seolah-olah rakyat yang dikejar-kejar? Padahal tujuan awalnya bukan seperti itu,” kata Taufik.

Oleh karena itu, Taufik menyambut baik adanya aturan mengenai batas minimal Penghasilan Tidak Kena Pajak. Sehingga, usaha-usaha kecil tidak dikejar oleh Tax Amnesty. “Perlu ada proses tahapan sosialisasi yang tidak hanya dilakukan oleh presiden. Jajaran pelaksana teknis juga harus menindaklanjuti hal tersebut,” imbuhnya.

Dengan demikian, maka pemerintah memang perlu untuk melakukan alternatif terobosan

yang lain. Salah satunya dengan melakukan program infrastruktur.

“Hal itu bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Karena bila infrastruktur bagus dan daya beli juga bagus, maka barang dan jasa akan semakin terjangkau,” tegasnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu menambahkan, situasi dan dinamika perekonomian terus berkembang. Karenanya, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI akan menindaklanjuti jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi itu.

Kemudian, Banggar akan melakukan pendalaman sesuai dengan kondisi kekinian. “Mungkin akan ada terobosan baru antara DPR RI dengan pemerintah. Sehingga, pengendalian defisit tidak hanya mengandalkan Tax Amnesty,” tukasnya.

Taufik menambahkan, pihaknya berharap agar asumsi makro tidak hanya sekedar slogan. Sebab, asumsi tersebut juga harus bisa mencerminkan kondisi mikro seluruh masyarakat sesungguhnya.

“Jangan hanya berkuat pada asumsi makro yang tidak mencerminkan kondisi riil. Daya beli yang semakin rendah,

kesenjangan yang semakin tinggi dan lapangan pekerjaan sempit, harus tersentuh oleh pemerintah,” tegas Taufik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan jawaban pemerintah, mengaku sependapat dengan DPR RI bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 harus dapat menunjukkan sisi optimisme dan berlandaskan pada perhitungan yang realistis untuk menjaga kredibilitas fiskal.

Namun, kata Sri Mulyani, pemerintah tetap mewaspadai

potensi risiko global yang masih akan dihadapi di tahun 2017. Di antaranya terkait harga komoditas yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang diproyeksikan masih akan berlanjut, serta ketidakpastian perekonomian global akibat dinamika kebijakan moneter di negara maju.

Menurut Menkeu, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen di RAPBN 2017, selain dirancang agar semakin realistis dan lebih berkualitas, juga lebih bersifat inklusif, sehingga mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja baru dan

mengurangi kemiskinan.

Sementara, penetapan asumsi dasar ekonomi makro lainnya di RAPBN 2017, seperti inflasi 4 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp 13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia US\$ 45 per barel, serta lifting minyak 780 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari, juga sudah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko, baik global maupun domestik.

“Pemerintah juga semaksimal mungkin berupaya mengoptimalkan penerimaan perpajakan dan meningkatkan tax ratio hingga mencapai 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Menkeu.

Pemerintah sependapat mengenai pentingnya langkah-langkah mengedepankan kehati-hatian dalam pengelolaan defisit anggaran. “Hal ini penting untuk mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal,” imbuhnya. ■



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memimpin Sidang Paripurna

# Konsultasi dengan Menkeu, Ketua DPR RI Tekankan *Good and Clean Governance*

Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan untuk terus membangun *good and clean governance*. Hal itu diungkapkan saat menerima konsultasi Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, (29/8).

“Tadi kami melakukan rapat konsultasi, dengan Menkeu, Menteri Bappenas, Pimpinan KPK, dan Pimpinan Komisi VII dan XI. Kita tadi membahas menyangkut komitmen bersama agar ada *clean and good*

*governance* menyangkut APBN,” ujar Akom, sapaan akrabnya.

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

Pertama, DPR RI dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan, lingkungan pemerintahan sampai pembahasan di DPR RI.

"Meskipun demikian, pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan hal-hal penting berkaitan dengan APBN tersebut," ujar Akom.

Kedua, DPR RI dan pemerintah sama-sama menciptakan *clean and good governance* dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN. "DPR RI juga



Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua Agus Hermanto dan Menkeu serta Menteri Bappenas

meminta pemerintah menerapkan anggaran ini dengan menerapkan money follow program (anggaran mengikuti program)," tutur Akom.

Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi ketidaksesuaian dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Keempat, DPR RI menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR RI sebagai agregasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). "Oleh karena itu DPR RI mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR RI terutama berkaitan program pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam setiap anggota DPR RI yang

dilantik," tutur Politisi Partai Golkar ini.

Kelima, mengenai kerja KPK, DPR RI mengapresiasi dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam ini harus meningkatkan peran APIP

menjadikannya lebih independen dalam bekerja.

"Keenam, DPR RI memandang perlu untuk konsultasi lanjutan untuk hal ini bersama pemerintah," tandas Akom.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengungkapkan, kesepakatan ini sangat penting. Karena kesepakatan ini menandakan pemerintah dan DPR RI punya pandangan yang sama dalam hal penyelenggaraan perencanaan anggaran negara.

Selain Menkeu Sri Mulyani, konsultasi ini juga dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pimpinan Komisi VII dan XI DPR RI. ■

(bnp) foto: kreanofr

BULETIN PARLEMENTARIA



**PENGAWAS UMUM** Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindy, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budliati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

**PIMPINAN PENERBITAN** Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Murdiyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon, Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

[ ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN ]

## Ketua DPR RI Imbau Konglomerat Taat Pajak

Ketua DPR RI Ade Komarudin mengimbau kepada para konglomerat Indonesia yang melakukan pengemplangan pajak agar sadar dan taat dengan aturan perundang-undangan pajak. Adanya Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk memberikan kelonggaran bagi orang-orang yang dulunya telah menghindar dari keharusan membayar pajak. Saat undang-undang tersebut telah berlaku maka hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu yang menjadi harapan Ketua DPR RI.

**M**engimbau kepada para pengusaha besar yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk kembali membawa uangnya balik ke Indonesia. Mereka hidup dan besar di Indonesia, kaya di Indonesia, dari bumi, air, dan udara di Indonesia, ya tolonglah mereka ada kesadaran," imbau Akom, sapaan Ketua DPR RI, di Gedung Nusantara, Selasa (30/8).

Menurut Akom, uang yang dibawa kembali ke Indonesia akan digunakan negara untuk investasi pembangunan sehingga terjadi pergerakan ekonomi. Dengan berjalannya pembangunan negara, maka ada penyerapan tenaga kerja, angka pengangguran berkurang, beban negara menjadi ringan.

"Dengan investasi berarti ada pergerakan ekonomi masyarakat. Tenaga kerja terserap. Maksudnya dari *Tax Amnesty* itu," jelas Akom.



Ketua DPR RI Ade Komarudin

Akom meminta kepada wajib pajak untuk memanfaatkan dengan baik Undang-Undang Pengampunan Pajak ini. Karena menurut penjelasannya selepas April 2017 bagi yang tidak mengikuti aturan UU tersebut akan

dikenakan denda 200 persen.

"Undang-undang itu ada kesempatan waktunya, itu berarti harus memanfaatkan waktu yang terbatas. Dari pada nanti dikenai denda dua ratus persen pada April tahun depan," ujarnya.

Akom juga meminta kepada pemerintah agar bersikap tegas dalam hukum yang telah berlaku. Dalam sosialisasi undang-undang tersebut hendaknya jangan sampai ada penyimpangan.

"Apakah ini ketidakmampuan menghadapi

konglomerat yang besar-besar itu. Sehingga konglomerat gampang berkomunikasi dengan mereka. Tolong diteliti dengan baik. Saya percaya Pak Tito bisa melakukan itu dengan baik," harap Akom. ■

(foto) Foto: Jaka/br

## Taufik Kurniawan: Sosialisasi *Tax Amnesty* Jangan Risaukan Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan tujuan UU *Tax Amnesty* secara makro untuk mengambil dana para pengusaha yang diparkir di luar negeri. Jangan sampai implementasi target tersebut melenceng dan malah menysar rakyat yang rajin membayar pajak.

“Maka dari itu Sosialisasi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang dilakukan oleh

Presiden Joko Widodo seharusnya ditindaklanjuti dengan sosialisasi agar tidak menimbulkan kerisauan di

masyarakat.

"Sosialisasi *tax amnesty* setelah dilakukan Presiden seharusnya



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan

ditindaklanjuti dengan sosialisasi di tingkat dirjen dan pengambilan keputusan di tingkat stakeholders," ujar Taufik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

Selain itu, pemerintah juga perlu menegaskan terkait pihak mana saja yang berkewajiban dalam keikutsertaan *tax amnesty*.

"Jangan sampai aturan tersebut dipolitisasi dan malah terkesan menakutkan rakyat. Dengan demikian, upaya menarik kembali uang para konglomerat ke Tanah Air nantinya tak menjadi bisa di publik. Sehingga tidak ada anggapan bahwa UU *Tax*

*Amnesty* seolah melindungi pelaku tindak pidana korupsi, narkoba, teroris, dalam rangka pemutihan pajak," katanya.

Dalam beberapa kali kesempatan rapat DPR RI dengan pemerintah, pihaknya telah meminta pemerintah agar melengkapi aturan *tax amnesty* dengan peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Dirjen Pajak.

"Karena tidak akan signifikan. Kan targetnya ribuan triliun. Saat ini masih di bawah Rp 5 triliun, itu pun 80 persennya masih di internal, dalam negeri. Itu yang saya maksud perlu tindak lanjut sosialisasi dari tataran teknis di tingkat pranata," tuturnya. ■

(mm), Foto: Andri/mr

## Gagasan Sekolah Perlemen Jangan Dipelintir

Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan, agar gagasan tentang sekolah parlemen tidak dipelintir. Karena menurutnya gagasan yang dia kemukakan berniat untuk meningkatkan kualitas anggota perlemen. Jika dipelintir dengan isu pemborosan anggaran maka hal tersebut bisa menghambat perkembangan parlemen.

“ Saya sudah bilang dari kemarin sekolah parlemen ini anggarannya tipis, malah dibilangnya pemborosan. Artinya niat baik itu tolong dihargai jangan dipelintir ke mana-mana,” tandas Ketua DPR RI saat diwawancarai usai mengisi materi di acara Rapat Kerja Nasional Forum Keluarga Alumni (FOKAL) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Grand Cempaka, Jakarta, beberapa saat lalu.

Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI, amat menyayangkan pertanyaan yang menyudutkan gagasannya. Dia menceritakan, sebelumnya ada yang mencurigai bahwa gagasan yang dia sampaikan hanya untuk pemborosan



Ketua DPR RI Ade Komarudin

saja. Akom menampik pernyataan tersebut, karena semua fasilitas sudah tersedia, jadi penggunaan anggaran

tidak akan banyak.

"Menggunakan anggaran sangat minim, karena tempat sudah ada. Tempatnya itu Wisma Kopo (Wisma DPR RI) *divermak* maksudnya dialih fungsikan menjadi kampusnya, tinggal guru nanti. Itu kan nanti teman-teman yang mau sekolah di situ kan bayar," ujar Akom.

Dia menjelaskan dalam sekolah parlemen yang dia gagas nanti layaknya Lemhanas, namun dalam pendidikan ini akan dipelajari secara lebih detail tentang semua fungsi dan tugas DPR RI. Dia juga menyadari, gagasannya ini tergantung dengan partai politik dan sistem rekrutmen di dalamnya. "Ini tergantung dengan partai politik itu sendiri," kata Akom. ■

(eko), Foto: Jayadi/fk

## DPR RI Dukung Pemerintah Ciptakan Iklim Usaha Kondusif

Ketua DPR RI Ade Komarudin mendukung pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini dia sampaikan menanggapi pidato Presiden Joko Widodo dalam acara Silaturahmi dan Dialog Nasional Ikatan Senior HIPMI, di Hotel Rafles, Ciputra World, Jakarta, Jumat (26/8) petang.

“Pemerintah harus menciptakan suasana berusaha yang kondusif. Yang lebih memungkinkan mereka berdaya saing, lebih efisien, terutama dalam hal perizinan, tidak berbelit-belit,” ungkap Akom, begitu Ketua DPR RI biasa disapa, sesaat setelah menghadiri acara Ikatan Senior HIPMI.

Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengakui, peringkat ease of doing business atau kemudahan berusaha di Indonesia masih jauh dibanding dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau Thailand.

"Singapore jelas nomor satu, Malaysia nomor 18, bandingkan dengan Thailand nomor 49, Indonesia nomor 109, jauh sekali," keluh Presiden Jokowi

Oleh sebab itu, Presiden meminta pada Menko Perekonomian agar tahun depan



Ketua DPR RI Ade Komarudin

dapat berada pada peringkat 40. Meski sejumlah menteri mengatakan hal itu sulit dicapai, Presiden Jokowi tetap meminta posisi di ranking 40. "Prosesnya dan step yang seperti apa silakan dibicarakan. Tapi

saya minta (rangking) 40," tegas Presiden.

Akom mengungkapkan apresiasi atas kebijakan pemerintah yang telah membuat perizinan usaha semakin efektif dan efisien. Menurutnya pemangkasan perizinan yang dinilai tidak perlu, supaya para pengusaha nyaman melakukan kegiatan usahanya.

Efisiensi perizinan yang dilakukan pemerintah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu harapannya lapangan pekerjaan dapat terbuka. Dengan terlibatnya peran swasta, beban pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan bisa terbantu.

"Langkah-langkahnya kalau melihat dari paparan Presiden Jokowi tadi sudah oke ya, misalnya banyak dipangkasnya perizinan," ujar Akom. ■

(ekom), Foto: Jayadi/br

## DPR RI Senantiasa Benahi Diri dan Terus Bekerja

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2015-2016 dalam Rapat Paripurna, sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun ke-71 DPR RI, Senin (29/8). Dalam sambutannya, Ketua DPR RI mengatakan, di tengah derasnya kritik masyarakat terhadap kinerja dewan, DPR RI senantiasa membenahi diri dan terus bekerja.

“Kritik masyarakat adalah sumber energi kita untuk menunjukkan kerja nyata, di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan yang kita emban,” ungkap Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pada Tahun Sidang 2015-2016 ini, Dewan telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 16 rancangan undang-undang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sidang sebelumnya yang menyelesaikan 12 rancangan undang-undang.

"Meskipun meningkat, kita dituntut untuk terus bekerja keras agar target prolegnas tercapai," ujar Akom.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran

selama Tahun Sidang 2015-2016, DPR RI senantiasa menjaga agar anggaran tidak defisit di atas 3,0% dari PDB. Dalam realisasi APBN Perubahan Anggaran 2015, defisit anggaran agak melebar menjadi 2,8% dari PDB. Sedangkan dalam APBN Anggaran 2016 dan APBN Perubahan Anggaran 2016 defisit anggaran masing-masing sebesar 2,2% dan 2,35% dari PDB.

"Oleh karena itu, dalam proses pembahasan anggaran negara setiap tahunnya, DPR RI selalu mengingatkan Pemerintah untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal dan kredibilitas fiskal dengan penetapan target-target yang realistis," papar Akom.

Sedangkan dalam pelaksanaan fungsi



Ketua DPR RI Ade Komarudin

pengawasan, pada Tahun Sidang 2015-2016, yang dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja baik dimasa reses maupun kunjungan kerja spesifik berdasarkan isu yang berkembang, telah dilaksanakan dengan baik.

Hal tersebut dibuktikan melalui hasil kerja delapan tim yang dibentuk Pimpinan, satu Panitia Khusus Non-RUU dan 46 Panitia Kerja yang dibentuk komisi. "Di antaranya, DPR RI melalui Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M berhasil menurunkan Ongkos Naik Haji tahun ini sebesar 132 USD," jelas Akom. ■

(ekom), Foto: Rani/br

## Kritik Lewat Seni Fotografi Demi Perbaikan Kinerja Parlemen

Pameran Foto Warna-Warni Parlemen yang mengusung tema "Menuju Parlemen Modern", resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, didampingi Wakil Ketua Korekku Taufik Kurniawan, Wakil Ketua Korinbang Agus Hermanto, Wakil Ketua Korpolkam Fadli Zon, dan Wakil Ketua Korkesra Fahri Hamzah, beserta Anggota DPR RI Ridwan Hisjam, Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dan Badan Keahlian Johnson Rajagukguk, yang ditandai dengan melakukan permainan angklung secara bersama.

“ Kita dukung semua kegiatan positif yang diselenggarakan disini, dan kita juga ingin terus memperbaiki diri agar kinerja parlemen semakin hari menjadi semakin baik, meskipun kelemahan akan selalu saja ada,” ujar Ade Komarudin dalam sambutannya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).

Ia berharap dapat bekerjasama secara baik dengan para wartawan dalam memberikan informasi yang seimbang kepada seluruh masyarakat Indonesia, boleh mengkritik kinerja DPR RI yang belum bagus, tetapi sisi baik DPR RI lainnya juga harus dikemukakan.

"Saya berharap agar kinerja para Anggota Dewan semakin hari kian baik, sesuai dengan harapan masyarakat. Saya juga tidak mau menutup mata dan telinga atas kritik tentang dewan dari masyarakat, buat saya dan para pimpinan, bila ada masalah atau tantangan hal itu berarti bagus. Artinya kita harus bekerja dengan lebih baik lagi," ucap pria yang akrab disapa Akom itu.

Banyak tantangan di dewan yang harus kita perbaiki bersama-sama, lanjutnya, perbaikan-perbaikan secara bertahap akan terus kita lakukan. Dalam foto-foto yang dipamerkan tersebut tergambar berbagai kinerja Dewan, dan ada beberapa diantaranya juga yang mengkritisnya lewat media foto.

"Silahkan mengkritik kinerja Parlemen, termasuk dalam bentuk foto, agar ada perbaikan yang bisa dilakukan. Terus terang saya sangat senang dengan adanya kegiatan ini," tandasnya.

Dari hasil jejak pendapat yang

mengatakan bahwa kinerja DPR RI sekarang sudah lebih baik, Akom mengibaratkan hal itu seperti angin segar.

"Ini baru mulai baik, artinya belum baik, kalau diibaratkan dengan angka adalah angka 6. Tidak termasuk angka merah tetapi merupakan batas akhir dari angka merah. Ini hanya bisa ditingkatkan kalau semua pihak

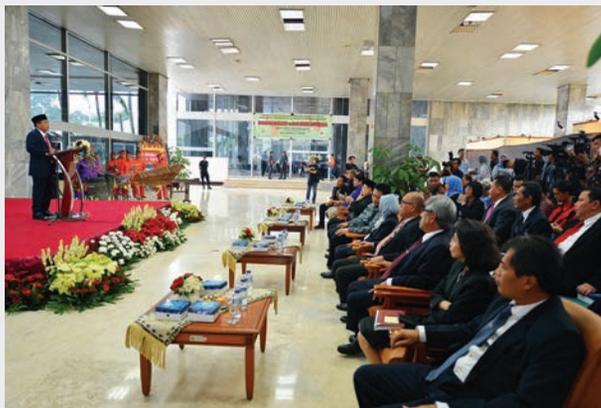
RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang terekam dalam lensa para awak media yang biasa bertugas di Gedung Parlemen.

Dari sejumlah 1300 buah foto yang masuk ke meja panitia seleksi, akhirnya panitia acara berhasil memilih sebanyak 101 buah foto yang dianggap layak secara mutu dan memiliki nilai jurnalistik untuk dipamerkan pada pameran kali ini. Adapun hasil foto yang dipamerkan adalah hasil karya jurnalistik para wartawan dari berbagai media nasional yang ada, dan juga hasil karya fotografer yang tergabung dalam Biro Pemberitaan Parlemen.

Dengan pelaksanaan pameran foto ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang berbagai kinerja yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan sebagai Wakil Rakyat, baik

yang dilakukan didalam gedung DPR RI maupun yang dilakukan diluar gedung DPR RI. Kegiatan kunjungan kerja Anggota Dewan ke berbagai daerah diseluruh Indonesia juga tak luput dari bidikan kamera para insan media. Khusus pada kegiatan kunjungan kerja anggota DPR RI tersebut, para Jurnalis dan Fotografer Bagian Media Cetak dan Media Sosial Pemberitaan Parlemen turut berpartisipasi mengabadikan kinerja Dewan tersebut saat menjalankan tugas dan fungsi kedewannya.

Pameran Foto warna warni Parlemen ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan dapat menjadi salah satu kegiatan yang memberikan pencerahan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang kinerja yang telah dilakukan oleh Anggota Dewan di Parlemen. ■



Suasana acara pembukaan pameran fotografi Wartawan Koordinatoriat DPR RI

bisa saling bersinergi dengan baik.

Pameran Foto Jurnalistik Warna-Warni Parlemen yang pada tahun 2016 ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Wartawan Koordinatoriat DPR RI. Pameran foto ini digelar dalam rangka memperingati 71 tahun Indonesia merdeka sekaligus untuk memeriahkan Ulang Tahun DPR RI yang ke 71.

Kegiatan pameran foto ini sudah menginjak tahun ke 5 sejak pertama kali diselenggarakan, dan acara ini juga sebagai bagian dari rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Setjen DPR RI hingga tanggal 3 September mendatang. Selain itu, hal yang tak kalah penting dari tujuan pelaksanaan pameran foto jurnalistik ini adalah untuk melihat berbagai kinerja Anggota DPR

## Anggota DPR RI Aktor Penting TPB

Para anggota parlemen merupakan aktor penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan ini harus akuntabel, inklusif, partisipatif, dan transparan. Dan yang menjadi sorotan adalah dana bantuan pembangunan, baik yang bersumber dari anggaran nasional maupun yang diperoleh dari donor internasional.

“Pengelolaan dana dalam jumlah besar ini harus terawasi dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itulah, parlemen bersama dengan pemangku kepentingan lainnya harus menjamin bahwa alokasi pembangunan mampu menjangkau kebutuhan konstituen yang beragam, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat.”

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua GOPAC Indonesia Chapter, Fadli Zon pada acara *Workshop on Development Effectiveness to Implement the SDGs*, Selasa (30/8), di Ruang Operation Room, DPR RI. Kegiatan ini merupakan bagian dari proyek kerja sama antara GOPAC dengan UNDP dan Islamic Development Bank, yang diluncurkan pada Konferensi Global GOPAC di Yogyakarta, Oktober 2015 lalu.

“Kerja sama ini fokus pada penguatan peran parlemen dalam memastikan efektivitas sumber daya pembangunan, khususnya terkait implemmentasi dan pencapaian target-target TPB,” kata Fadli dalam sambutannya. Dari kerja sama ini, lanjut Fadli, telah dihasilkan buku panduan (*Handbook*) bagi Anggota Parlemen yang dapat digunakan dalam pengawasan dana pembangunan, serta pengawasan proses pelaksanaan TPB di masing-masing negara.

Buku panduan itu diharapkan mampu menyediakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pembangunan TPB. Dan para anggota parlemen, diimbau Fadli, mampu menyadari peran strategis dalam implementasi TPB tersebut. Wakil rakyat harus bertanggung jawab mendorong pembangunan yang berpusat pada rakyat dan responsif terhadap kebutuhan konstituenya.

Ditambahkan Fadli, salah satu tantangan



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

TPB adalah tindak pidana korupsi. Memerangi korupsi adalah tindakan utopis. Untuk itu, perlu menyatukan komitmen dan menggabungkan semangat nasional dan global melawab korupsi.

“Melalui GOPAC ini, kami bersama-sama menguatkan komitmen dan berkolaborasi dalam gerakan anti-korupsi. GOPAC merupakan satu-satunya organisasi jaringan anggota parlemen internasional yang fokus pada isu-isu anti-korupsi, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, dan penegakan supremasi hukum secara internasional,” ungkap Fadli. ■

(mb), Foto: suagfardji/mr

## LP3ES Diharapkan Tetap Survive pada Ulah ke-45

Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima audiensi Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (30/8). Kedatangan LP3ES ini dikarenakan lembaga penelitian ini akan merayakan hari ulang tahunnya ke 45 tahun.

“Ini lembaga yang cukup bagus. Jadi sekarang mereka mau ulang tahun dan ingin mengundang saya. LP3ES itu lembaga kredibel dan bagus, jadi sebaiknya kita bisa menjaganya dengan baik, terutama jurnalnya,” ujar Akom, sapaan akrabnya.

Politisi Golkar ini pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada LP3ES, dan mendorong agar tetap *survive* serta terus melakukan pengabdian melalui penelitian



Ketua DPR RI Ade Komarudin menerima Jurnal dari LP3ES

dan pembukuan. “Selamat ulang tahun

kepada LP3ES ke 45. Semoga tetap *survive* dan terus melakukan pengabdian melalui penelitian dan pembukuan,” ujarnya ketika memberikan testimoni.

Akom yang pernah mengenyam pendidikan di UIN Jakarta ini pun mengaku terkesan dengan jurnal ilmiah yang dihasilkan LP3ES yakni jurnal *prisma*. Ia pun meminta kepada pengurusnya agar segera dipikirkan benar supaya jurnal *prisma* ini tetap tumbuh berkembang dengan modifikasi baru yang sesuai dengan tantangan jaman.

“Saya terkesan dengan LP3ES terutama jurnal ilmiahnya. Saya pernah membaca tulisan berkualitas. Misalnya tulisan Dawam Rahardjo, Cak Nur serta Mochtar Pabotinggi. Tulisannya masih ada di perpustakaan pribadi saya. Di ulang tahun ke 45, saya rasa perlu dipikirkan benar agar jurnal *prisma* ini tetap bisa tumbuh dengan modifikasi baru sesuai tantangan jaman.” ujar Akom. ■

(bs.smp), Foto: Rani/mr

## Ketua DPR RI Nilai Dawam Rahardjo Sosok Yang Dikagumi

Ketua DPR RI Ade Komarudin menilai sosok Dawam Rahardjo sebagai orang yang dikagumi di kalangan generasi muda. Semasa kuliah ia pun sering kali membaca karya-karyanya. Hal itu diungkapkan usai menerima audiensi Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa, (30/8).

Soal Dawam Rahardjo, beliau sangat dikagumi, teman-teman anak muda, semacam saya dahulu. Begitu juga dengan Cak Nur. Mereka itu figur," ujar Akom.

Meskipun begitu, Akom menyadari karena faktor usia, sehingga harus ada batasnya. Oleh karena itu harus ada anak muda penerusnya yang secara pengetahuan sudah mendapat transformasi pemikiran dari sosok Dawam Rahardjo. "Tapi karena faktor umur harus ada batasnya. Harusnya ada anak muda sebagai penerusnya yang secara pengetahuan pasti sudah mendapatkan transformasi dari Mas Dawam (panggilan akrabnya), kalau sekarang Mas Dawam sebagai simbol saja," jelas Akom.



Ketua DPR RI Ade Komarudin saat menerima LP3ES

Akom yang dahulu tercatat sebagai aktivis HMI Ciputat ini pun berpesan agar buah pemikirannya tetap dijaga. "Mungkin buah pikirannya. Karena harus dijaga juga kesehatan

beliau. Nah Mas Dawam itu satu angkatan dengan Cak Nur," tuturnya.

Politisi Golkar ini pun juga berpesan bahwa ini kesempatan bagi generasi muda untuk mendapatkan pengetahuan dari Dawam Rahardjo. "Alhamdulillah beliau masih ada. Beruntung kita, nah sekarang kesempatan bagi temen-temen untuk mendapatkan kaderisasi dari beliau," ujar Akom.

Sebagaimana diketahui, Dawam Rahardjo adalah salah satu cendekiawan muslim yang

banyak berbicara soal dimensi Islam yang berperspektif modernisme, toleran dan menghargai antar umat beragama. Ia juga sebagai salah satu pendiri LP3ES. ■

(b.m.p.), foto: rumi/br

## Wakil Ketua DPR RI Terima Dubes Korsel

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8) menerima kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, H.E. Mr. Cho Taiyoung.

Taufik mengatakan pertemuan dengan Dubes Korsel Cho Taiyoung membahas hubungan bilateral kedua negara. "Kita berbicara masalah hubungan bilateral, luar negeri, politik dan kerjasama parlemen Korea Selatan dan Indonesia," jelas Taufik.

Selain itu, dalam pertemuan juga membahas keprihatinan terhadap masalah senjata nuklir dan ketidakpatuhan Korea Utara terhadap resolusi bersama negara-negara di dunia untuk menghentikan senjata nuklir.

"Pelucutan senjata nuklir di Korea Utara memang bukan hanya menjadi keprihatinan Korea saja tetapi seluruh bangsa di dunia. Korea Utara tidak bisa mengancam aspek kehidupan negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan dan



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menerima kunjungan Dubes Korea Selatan

kehidupan negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin," tuturnya.

Lebih lanjut politisi fraksi PAN ini

mengatakan, Indonesia tetap mengedepankan politik bebas dan aktif, tidak berpihak pada salah satu pihak, tetapi dalam kaitannya dengan aspek senjata nuklir tentunya itu menjadi berbeda.

"Bahwa ini (senjata nuklir-red) sudah sangat membahayakan dan sudah bukan zamannya lagi berbicara soal mengancam senjata nuklir sesama manusia," katanya.

Ia berharap komunikasi pada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia dapat ditingkatkan, untuk aktif terlibat dan segera menyuarakan upaya untuk pelucutan seluruh senjata nuklir di dunia. Dalam pertemuan itu, turut hadir Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyas Titi. ■

(m.m.), Foto: Andri/br

## GOPAC Indonesia Siap Bekerja

*Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) Indonesia siap bekerja menyukseskan komitmen dan memimpin gerakan anti korupsi. Isu-isu anti korupsi dan kemitraan dalam memerangi bahaya endemik korupsi terus dilakukan.*

**K**etua GOPAC Indonesia Fadli Zon mengatakan itu di hadapan para delegasi GOPAC dari berbagai parlemen di dunia, Selasa (30/8). Hadir pula utusan UNDP, *Islamic Development Bank*,



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan sambutan dalam acara GOPAC

dan *Westminster Foundation for Democracy*. GOPAC Indonesia sendiri sudah berdiri sejak 12 Desember 2012. Kini, keanggotaan GOPAC Indonesia sudah mencapai 61 orang, menyumbang hampir 30 persen dari total anggota GOPAC di seluruh dunia.

Keanggotaan GOPAC diisi para anggota parlemen yang masih aktif maupun yang sudah tak menjabat lagi. "GOPAC Indonesia hadir untuk mereka yang memiliki komitmen dan mempunyai kemampuan untuk memimpin gerakan anti korupsi. Ke depan, GOPAC Indonesia berkomitmen untuk terus fokus pada penguatan fungsi parlemen dalam beragam

isu anti korupsi, serta lebih erat menjalin kemitraan dan kerja sama bersama para pemangku kepentingan terkait," ujar Fadli.

Fadli berharap, perhelatan ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengevaluasi dan mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dalam istilah global disebut *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Momentum tepat ini diserukan Fadli kepada para anggota parlemen dari kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, institusi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selama perhelatan digelar (30-31/8), para delegasi berdiskusi dan bertukar informasi maupun pengalaman dalam

memastikan implementasi TPB tersebut. "Agenda ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kesempatan bagi dunia untuk merefleksikan hasil pembangunan yang telah dicapai, serta menetapkan arah baru bagi

pembangunan masa depan," jelas Wakil Ketua DPR RI itu.

TPB, sambung Fadli, mengatur tata cara dan prosedur pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai masyarakat yang damai tanpa kekerasan, non-diskriminasi, partisipasi, tata pemerintahan yang terbuka, serta kerja sama dan kolaborasi multisektor. Setelah itu, beralih ke proses implementasi. Dalam mengimplementasikannya butuh koordinasi yang efektif, kerangka hukum yang kuat, dan pengawasan yang komprehensif untuk mendukung pelaksanaan TPB secara konsisten dalam jangka panjang. ■

(mb), Foto: Xingfang/jk

## Tak Hanya Atlet, Seniman Juga Harumkan Nama Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan tidak hanya atlet saja yang dapat mengharumkan nama Indonesia, namun seniman juga memiliki andil dalam mengharumkan bangsa Indonesia di dunia. Hal itu diungkapkan usai memberikan sambutan pembukaan pameran seni rupa yang diadakan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka HUT DPR RI ke 71 di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin, (29/8).

“Fadli Zon mengapresiasi karya seni rupa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan bangsa. Ia pun menegaskan tidak hanya atlet olimpiade saja yang dapat mengharumkan nama Indonesia, seniman pun juga memiliki andil yang sama.

"Ini adalah pameran seni rupa dari perupa Indonesia dari beberapa provinsi. Kita apresiasi karya mereka sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Jadi bukan hanya atlet olimpiade saja yang dapat mengharumkan nama bangsa tapi seni dan budayawan juga menjadi bagian yang tak terpisahkan," ujar Fadli.

Politisi Gerindra ini juga menegaskan bahwa bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai seni budaya. "Maka

sebetulnya bangsa yang beradab adalah bangsa yang menghargai seni budaya. Tak ada bangsa yang beradab yang tak hargai seni budaya," terangnya.

Hal itu tercermin dari upaya DPR RI yang selalu mengapresiasi karya seni, baik itu seni rupa ataupun seni musik. Sehingga tak jarang DPR RI pun juga sering melakukan pagelaran seni budaya. "Kita juga di DPR RI terus apresiasi karya seni budaya, baik dari berbagai bentuk yakni seni rupa maupun seni musik, gedung DPR RI juga dihiasi berbagai karya seni." ujarnya.

Fadli pun berharap, kedepan DPR RI akan semakin banyak ruang seni. Ia pun menegaskan DPR RI sangat terbuka



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

bagi seniman untuk berkarya. "Ke depan, mudah-mudahan akan semakin banyak ruang seni. DPR RI ini sangat terbuka

bagi seniman," tuturnya. "Pada intinya kita apresiasi seni rupa adalah bagian dari aset nasional. Karya seni rupa ini bisa menjadi kebanggaan kita," sambung Fadli.

Selain dihadiri Fadli Zon, acara pembukaan pameran lukisan yang mengusung tema "Kepada Republik #2" ini, juga dihadiri oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang, Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany dan Kepada Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk. ■

(bs.mph), Foto: Azka/mr

## Lembaga Anti Korupsi Harus Garang Perangi Korupsi

Lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dua lembaga lainnya, Kepolisian dan Kejaksaan harus lebih garang dan efektif dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi endemik di Indonesia.

Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan hal ini dalam pidato pembukaan Workshop on Development Effectiveness to Implement the SDGs di DPR RI, Selasa (30/8). Dalam pertemuan itu, hadir para delegasi dari berbagai parlemen dunia, terutama delegasi *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC). Hadir pula delegasi *Islamic Development Bank* (ISDB), *United Nation Development Programme* (UNDP), dan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD).

Ketua DPR RI mengapresiasi terbentuknya Gopac Indonesia Chapter. Dan chapter ini akan menjadi ujung tombak parlemen Indonesia dalam memerangi korupsi. "Saya atas nama DPR RI juga ingin menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kerja luar biasa dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia. Lembaga-lembaga ini dibangun dengan



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Wakil Ketua Fadli Zon dan Kepala Bappenas

harapan bahwa lembaga anti korupsi ini dapat secara efektif dan garang memerangi korupsi endemik di Indonesia."

Menurut Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI, korupsi sudah jadi musuh bersama di Indonesia. Dan perlawanan terhadap kejahatan korupsi merupakan bagian dari kampanye pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang akuntabel. Di bawah komando tiga lembaga hukum tersebut serta didukung

parlemen dan GOPAC Indonesia Chapter, pemberantasan korupsi diharapkan bisa sukses.

"Saya percaya, meskipun GOPAC Indonesia Chapter tidak memiliki kewenangan hukum dalam melawan korupsi, namun Chapter tersebut memiliki nilai-nilai dan semangat yang sama dengan para penggiat anti korupsi untuk mengakhiri korupsi endemik di Indonesia," ucap Akom lebih lanjut.

Seperti diketahui, pada pertemuan konferensi GOPAC di Yogyakarta, telah diluncurkan program penulisan *a handbook for Parliamentarians on the Parliamentary Oversight of Development Funds and Monitoring of Progress towards the SDGs*. "Sebagai kelanjutan dari konferensi tersebut, hari ini kita akan berdiskusi tentang peluang-peluang dan menyusun kerja nyata untuk memastikan efektivitas pembangunan sumber daya dan pelaksanaan TPB," jelas Akom. ■

(mb), Foto: Jayadi/mr

## DPR RI Setujui P2 APBN 2015 Jadi UU

Rapat paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015 disahkan menjadi Undang-undang. Persetujuan ini disepakati dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Selasa (30/8).

“ Sidang dewan yang kami hormati, kami menanyakan kepada seluruh Fraksi DPR RI, apakah RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Taufik. Serentak sidang dewan menjawab "setuju". Ketukan palu menjadi penanda pengesahan undang-undang tersebut.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan laporan tentang tahapan dan proses Pembicaraan Tingkat I. Dalam laporannya Banggar DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI pada 25 Juli 2016. Sampai dengan pembahasan tingkat Panja Perumusan kesimpulan pada 22 Agustus 2016, dan Panja Draft RUU pada 23 Agustus 2016.



Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah

Said juga melaporkan realisasi APBN, laporan perubahan, neraca, laporan oprasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan, serta tindaklanjut rekomendasi untuk pemerintah.

Dalam laporannya Banggar DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah agar mampu meningkatkan kapasitas laporan keuangan pemerintahan. terutama terhadap

laporan keuangan Pemerintah Pusat, laporan keuangan Bendahara Umum Negara, laporan keuangan kementerian dan lembaga yang masih mendapat opini audit 'Wajar Dengan Pengecualian' atau 'Tidak Menyatakan Pendapat'.

Menanggapi persetujuan DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terimakasih kepada DPR RI atas kerjasama dan komitmen yang kuat sehingga RUU P2

APBN TA 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

"Dengan disetujuinya RUU ini menjadi Undang-Undang, maka selesailah rangkaian siklus pengelolaan APBN 2015. Kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat," papar Sri dalam pidatonya di hadapan Sidang Dewan. ■

(eko.mp), Foto: Andri/hr

## APBN 2017 Diharapkan Realistis dan Tepat Sasaran

Badan Anggaran DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Bappenas RI, Menteri Hukum dan HAM serta Gubernur Bank Indonesia. Dalam rapat ini membahas tentang penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017 dan pembentukan Panja dan Tim Perumus.

“ Dalam rapat, Anggota Banggar DPR RI Sukiman berharap, APBN 2017 disusun secara realistis dan bisa mencapai target. "Kita tidak ingin APBN tahun 2017 ini tidak realistis, tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai dengan target pertumbuhan kita," harap Sukiman saat diwawancarai selepas rapat, di Gedung Nusantara II, Selasa (30/8) petang.

Menurut Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini, perumusan APBN tahun 2017 penting. Dalam pembahasannya akan

mempertimbangkan situasi ekonomi internasional dan tentu dalam negeri. Penerimaan negara dari sektor pajak juga menjadi sorotan dalam pembahasan.

"Dengan memaparkan situasi ekonomi secara global maupun di dalam negeri ini. Terutama berkaitan dengan kondisi ekonomi kita, termasuk kemampuan daya terima negara, penerimaan dari sektor pajak maupun non pajak. Ini harus menjadi kajian mendalam," ungkapnya menjelaskan.

Sesuai rencana DPR RI dan Pemerintah menargetkan Pembahasan



Anggota Badan Anggaran DPR RI Sukiman

## Terkait Pelaksanaan Haji, Dewan Minta Pemerintah Ubah Pola Pikir

Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR RI, sekaligus Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, mengatakan sudah saatnya Pemerintah mengubah pola pikir selaku penyelenggara haji dengan jumlah jemaah terbesar di dunia. Fahri menilai, Pemerintah masih bersikap seolah Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji yang sedikit. Padahal jumlah kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 160 ribu jemaah.

“Jangan seperti peserta kecil. Jemaah kita ini mayoritas di sana. Karena itu mentalitas kita harus sebagai penyelenggara yang juga ambil saham dalam pengadaan fasilitas,” tegas Fahri, usai Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pidato Penyampaian Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016 dalam rangka HUT DPR RI ke-71, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).

Menurut politisi F-PKS itu, pemerintah kurang maksimal dalam melakukan lobi kuota jemaah haji kepada Pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, dengan semakin banyaknya kuota bagi jemaah berusia 70 tahun ke atas di tahun ini akan meringankan beban penyelenggaraan haji di tahun berikutnya. Sebab di tahun-tahun berikutnya jumlah jemaah yang berusia 70 tahun ke atas akan semakin berkurang dan jumlahnya bisa seimbang dengan jemaah haji yang berusia muda.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

"Saat ini 60 sampai 70 persen jemaah haji kita berusia 70 tahun ke atas, semestinya pemerintah melakukan lobi untuk menambah jumlah kuota agar jemaah yang berusia 70

tahun ke atas bisa dimasukan lebih banyak. Kalau jumlah jemaah haji yang tua dan muda seimbang, maka yang muda bisa menolong yang tua," jelas Fahri.

Dengan jumlah jemaah terbesar di dunia, Indonesia memiliki nilai tawar di mata Pemerintah Arab Saudi. Seharusnya, hal itu bisa dimanfaatkan Pemerintah untuk membangun fasilitas kesehatan dan penginapan milik Indonesia yang bisa dikomersilkan di Mekkah atau Madinah. Sehingga, ketika memasuki musim haji, fasilitas kesehatan dan penginapan tersebut bisa digunakan untuk pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Mekkah dan Madinah itu kota internasional. Tinggal cara ngomong ke Saudi saja yang dipikirkan. Ngomong dulu sama Saudi kalau bisa adakan investasi berupa rumah sakit milik Indonesia, dan nanti di musim haji kita kontrak untuk melayani jemaah haji kita," ucap Fahri.

Fahri menyarankan, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menambah jumlah kuota jemaah haji, di antaranya dengan meminta sisa kuota yang tak jadi digunakan oleh jemaah haji negara lain.

"Misalnya Iran, kuota 75 ribu jemaah tidak dipakai. Harusnya ambil buat Indonesia, berikan kepada Jemaah yang berusia tua, sehingga beban penyelenggaraan haji di tahun depan lebih ringan," saran politisi asal dapil NTB itu.

Sebagaimana diketahui, DPR RI membentuk tim pengawas untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji 1437 H. Dua tim diberangkatkan ke Arab Saudi. Tim pertama dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah akan memantau persiapan pelaksanaan ibadah haji pada 23-29 Agustus 2016. Sementara, tim kedua akan dipimpin Ketua DPR RI Ade Komarudin untuk melakukan pemantauan pada 2-18 September 2016. ■

APBN tahun 2017 bisa selesai pada 20 Oktober. "Kita berharap pembahasan APBN tahun 2017 ini, Badan Anggaran serta komisi-komisi terkait bisa selesai pada bulan Oktober, paling lambat tanggal 20," ujar Sukiman.

Dalam agenda rapat juga ada pembentukan Panja dan Tim Perumus. Antara lain, Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RUU APBN 2017. Akan dibentuk juga, Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2017, Panja RUU Transfer ke Daerah dan Dana Desa RUU APBN 2017, serta Panja Draft RUU APBN 2017.

"Mudah-mudahan melalui panja-panja inilah kita duduk bersama dengan pemerintah. Kita tidak ingin

nanti APBN kita tidak realistis, tidak sesuai dan meleset apa yang menjadi perkiraan bersama," ungkapnya.

Inflasi juga menjadi perhatian dalam rapat, diharap inflasi tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Melalui penyampaian pokok-pokok RUU APBN 2017, berkaitan dengan kondisi perekonomian dunia ataupun dalam negeri, ini penting sebagai dasar memberikan pertimbangan persetujuan.

"Mudah-mudahan semua energi kita baik DPR RI atau pemerintah semuanya dalam rangka untuk mendorong kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kita," harap anggota Dewan dari dapil Kalimantan Barat. ■

(foto) Foto: Anandri/ik

(sf) Foto: Naeffraj/ik

# APBN Harus Dikelola Berkelanjutan, Untuk Ciptakan Stabilitas Makro ekonomi

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017, sebagai pelaksanaan tahun ketiga RPJMN 2015 - 2019, mempunyai peranan yang sangat strategis, baik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas sasaran - sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 - 2019, maupun dalam menyusun strategi percepatan pencapaian berbagai sasaran tersebut.

**D**emikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membacakan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI terhadap RAPBN 2017, saat Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (F-PAN, dapil Jawa Tengah).

Menkeu menjelaskan, RAPBN tahun 2017 sebagai instrumen kebijakan fiskal, bersama-sama dengan berbagai instrumen kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, dan kebijakan sektoral memiliki peranan yang fundamental dalam pengolahan ekonomi yang sehat dan *sustainable*.

Hal ini sebagai landasan untuk mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara penanganan berbagai persoalan jangka pendek, dengan upaya membangun dan memperkuat pondasi perekonomian jangka menengah dan jangka panjang berdasarkan efisiensi, produktivitas dan asas keadilan.

"APBN harus dikelola secara hati-hati, bijaksana, kredibel, akuntabel, dan *sustainable* atau berkelanjutan agar mampu menjadi jangkar dalam menciptakan stabilitas makro ekonomi, dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang efektif dalam memberikan stimulasi pada perkembangan perekonomian nasional, memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," jelas Menkeu.



*Menkeu Sri Mulyani*

Menkeu memaparkan, melihat pencapaian APBN dua tahun ke belakang, yakni pada 2014 dan 2015, serta mengevaluasi pelaksanaan APBN Perubahan 2016, mengembalikan kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN ini menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien sesuai prioritas, menciptakan kepastian dan mengembalikan kepercayaan pasar (*market confident*) dari para pemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun diluar negeri terhadap pengelolaan kebijakan ekonomi makro Indonesia yang sehat, bijaksana, hati-hati dan *sustainable*.

"Kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN hanya dapat dibangun jika terpenuhi dua langkah strategis, yakni merumuskan kebijakan fiskal yang tepat, dan menyusun perencanaan APBN baik dari sisi pendapatan dan belanja secara akurat dan realistis. Berikutnya, menjaga disiplin fiskal dan anggaran yang ketat dalam pelaksanaan APBN," tambah Menkeu.

Lebih lanjut Menkeu menjelaskan, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan

APBN dua tahun terakhir, maka urgensi utama dalam mengembalikan kredibilitas kebijakan fiskal dan APBN saat ini adalah pada ketepatan dalam penetapan target dan pencapaian realisasi penerimaan perpajakan. Hal ini, terutama karena pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara, sehingga pendapatan target penerimaan pajak yang terlalu tinggi, akan memberi resiko yang sangat besar dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan APBN.

Menkeu memastikan, koreksi kebijakan fiskal yang dilakukan pada APBN pada tahun 2016 tersebut,

selanjutnya akan menjadi basis perhitungan RAPBN tahun 2017 yang lebih rasional dan kredibel, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik yang terjadi hingga saat ini, serta prospeknya kedepan dengan tetap memperbaiki upaya perbaikan penerimaan perpajakan.

Dalam rangka memberikan daya dorong terhadap perekonomian, lanjut Menkeu, prioritas alokasi belanja Negara dalam RAPBN tahun 2017 difokuskan pada program-program pembangunan infrastruktur, serta program-program perlindungan sosial yang berbasis pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan kesenjangan.

"Dengan berbagai strategi dan langkah-langkah kebijakan diatas, RAPBN tahun 2017 diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan stimulasi pada perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal, dan mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RKP 2017 sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2015-2019," harap Menkeu. ■

*(Sf) foto : kreano/br*

## Dipertanyakan Upaya Calon Hakim Agung Jadikan MA Disegani

Sejumlah anggota Komisi III DPR RI mempertanyakan upaya yang akan dilakukan para calon hakim agung untuk membuat Mahkamah Agung menjadi lembaga hukum yang cukup disegani. Hal tersebut terungkap saat uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Hakim Agung oleh Komisi III DPR RI, di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Senin (29/8).

“ Apa upaya yang konkrit yang akan dilakukan saudara agar MA (Mahkamah Agung) menjadi lembaga negara yang benar-benar bagus dan cukup disegani. Banyak keputusan MA yang dinilai sebagian masyarakat tidak memenuhi rasa keadilan. Jika anda menjadi Hakim Agung bagaimana sikap anda jika menerima intervensi,” tanya anggota Komisi III DPR RI, Daeng Muhammad kepada Edy Riadi, salah satu calon Hakim Agung yang ikut menjalani test tersebut.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi III lainnya, Adies

Kadir yang mempertanyakan gebrakan yang dilakukan terkait penumpukan kasus yang ada di Mahkamah Agung. Sementara anggota Komisi III lainnya, Ichsan Soelistyo mempertanyakan makalah yang disusun Edi Riadi terkait aliran Ahmadiyah. Dalam makalahnya Edi mengatakan bahwa sepanjang tidak melakukan tindakan pidana, maka aliran tersebut tidak masalah.

“Apa bapak berani mempertahankan hal tersebut jika terpilih menjadi hakim agung,?” tanya Ichsan.

Edi Riadi menjadi salah

satu calon hakim agung yang hari ini menjalani *Fit and propertest*, selain dua calon hakim lainnya yakni Hidayat Manao dan Ibrahim. Sementara Panji Widagdo dan Setyawan Hartono telah menjalani Uji kepatutan dan kelayakan sebelumnya, Kamis (25/8). ■

(Ayu) Foto: Anurizki



Anggota Komisi III DPR RI Daeng Muhammad

## Komisi X Imbau Tempat Wisata Kuliner Jabar Sediakan Pojok Baca

Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI tentang perpustakaan, melakukan kunjungan dan menggelar pertemuan dengan Pemprov Jawa Barat, Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Komunitas Baca Jawa Barat, di Gedung Sate Bandung, Jumat (26/8).

Pada kunjungan kali ini Tim Komisi X menyoroti soal digitalisasi perpustakaan dan sosialisasi gemar membaca berkaitan dengan budaya membaca

“Kami mengimbau melalui pemerintah provinsi dan juga pemerintah daerah di seluruh Jawa Barat agar mengatur para pelaku industri kuliner atau pebisnis restoran untuk menyediakan pojok baca atau mengadakan rak-rak berisi buku demi ikut memasyarakatkan gemar membaca ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah yang sekaligus menjadi Ketua Tim Kunker.

Ditemui oleh Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar, Komisi X mengajak Pemprov Jawa Barat melakukan



Tim Kunspek Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan Pemprov Bandung

koordinasi dan opatimalisasi kerjasama dengan mitra-mitra kerja Komisi X DPR

RI. Mitra kerja itu diantaranya dengan Kementerian Riset-Dikti, Kemendikbud, Kemenpar, Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Diharapkan melalui sinergi bersama Kemenpar dengan Badan Ekonomi Kreatifnya, Jawa Barat yang terkenal dengan wisata kuliner dengan beraneka tempat makannya, bisa memberikan peran besar dalam sosialisasi gemar membaca untuk semua kalangan. ■

(ray) Foto: Rizka/mr

## Anggaran Harus Berpihak pada Peningkatan Minat Baca

Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana menegaskan, anggaran dalam APBN harus berpihak pada peningkatan minat baca masyarakat. Apalagi data *World's Most Literate Nations*, yang disusun oleh *Central Connecticut State University* tahun 2016 menyebutkan, peringkat literasi Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara yang diteliti.

Demikian disampaikan saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, baru-baru ini. Kunjungan spesifik ini dipimpin oleh Anggota Komisi X DPR RI Bambang Sutrisno (F-PG/dapil Jateng), dan diikuti oleh Anggota Komisi X DPR RI Isma Yaton (F-PDI Perjuangan/dapil Lampung), Marlinda Irwandi (F-PG/dapil Jateng), dan Sy. Anas Thahir (F-PPP, dapil Jatim).

Meli menambahkan, permasalahan perpustakaan di setiap daerah hampir sama, diantaranya sarana dan prasarana yang kurang, SDM yang tidak mumpuni, hingga manajemen yang lemah. Ia pun tak memungkiri, minimnya anggaran menjadi masalah terbesar dalam meningkatkan minat baca. Bahkan pagu anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam RAPBN 2017 hanya Rp 563 miliar.

"Kalau memang kita mau memperkuat literasi atau minat baca dan memajukan perpustakaan, anggaran harus berpihak. Tanpa keberpihakan anggaran, semua hanya tinggal cita-cita. Kalau begini, apa mau slogan-slogan perpustakaan tidak terlaksana," tegas Meli.

Untuk membantu program peningkatan minat baca, Politisi F-Gerindra itu mendukung penyaluran mobil perpustakaan keliling ke daerah-daerah, salah satunya ke Provinsi Sultra ini. Apalagi, dengan jumlah mencapai 17 kota dan kabupaten di Sultra. Ia mendukung satu kabupaten/kota minimal satu mobil perpustakaan keliling.

"Kita harapkan, walaupun jumlah mobil tidak banyak, turunnya merata. Apalagi dengan ciri khas kita yang daerahnya luas dan antar pemukiman yang jauh, sehingga perpustakaan keliling itu menjadi kebutuhan. Bantuan berupa mobil perpustakaan keliling itu yang paling diharapkan. Yang pertama mobilnya dulu, baru isi pustakanya," jelas Meli.



Anggota Komisi X Sri Meliyana

Politisi asal dapil Sumsel itu menyarankan kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sultra untuk mengikutsertakan semua pihak dalam program peningkatan minat baca. Termasuk dengan perpustakaan komunitas, dan perusahaan di daerah dengan kerjasama tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.

"Ini memang butuh upaya yang lebih keras lagi. Walaupun kami tidak mampu menjanjikan semua permintaan dari Pemprov Sultra, tapi kami mendukung. Kita harus jujur, hal ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Karena kita tidak akan menjadi cerdas, jika kita tidak membaca," tutup Meli.

D a l a m

kesempatan ini, Sekprov Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perpustakaan masih minim. Jumlah staf perpustakaan dinilai masih minim untuk memenuhi kebutuhan. Diketahui, staf perpustakaan dari PNS sebanyak 70 orang, dan pegawai kontrak sebanyak 30 orang.

"Sarana prasarana kami juga masih minim. Koleksi buku kami juga sangat terbatas. Sehingga kami berharap ada penambahan koleksi buku," harap Lukman. Ia juga berharap, anggaran untuk perpustakaan juga dapat ditingkatkan.

Saat pertemuan, sejumlah perwakilan perpustakaan komunitas dan perwakilan perpustakaan sekolah mengeluhkan hal yang sama. Sarana dan prasarana masih minim, belum adanya perpustakaan keliling dan pelatihan SDM perpustakaan. ■

(9). Foto: Sifan/jk

## Utang Sebabkan Kerusakan APBN

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyesalkan kebijakan pemerintah yang asal-asalan berutang tanpa memikirkan efek setelahnya. Menurutnya utang menjadi sebab rusaknya postur APBN Indonesia. Dia memaparkan hingga saat ini, utang dalam negeri tercatat lebih dari Rp 4.000 triliun. Sekitar Rp 3.300 triliun di antaranya adalah utang pemerintah pusat.

“ Semua tahu bahwa utang yang makin besar menjadi sebab rusaknya APBN yang disusun pemerintah. Lihat saja, defisit makin lebar hampir tiga persen. Lalu, utang tersebut raib entah kemana. Tidak produktif,” keluh Heri dalam rilis yang diterima Parlemen, Jumat (26/8).

Dia mengatakan, meskipun hutang banyak namun infrastruktur tetap saja tidak banyak berubah. Bahkan, data

## Komisi VI DPR RI Sidak ke Terminal 3

Komisi VI DPR RI melakukan sidak ke Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta untuk melihat dari dekat hasil pembangunan yang sudah dilakukan dan menginventaris masalah yang ditemukan. Komisi VI menilai, terminal ini belum saatnya dibuka untuk publik, karena masih banyak sarana dan fasilitasnya belum rampung.

Dari pantauan yang dilakukan, akses jalan di ruang tunggu penumpang terlalu sempit, karena sebagian digunakan untuk kios-kios. Lampu penerangan dinilai terlalu silau, sehingga membuat penumpang tidak nyaman. Komisi VI berharap, terminal ini harus siap 100 persen sebelum dibuka untuk akses penerbangan.

Delegasi Komisi VI yang melakukan sidak ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, dan dua wakilnya M. Farid Al Fauzi dan M. Hekal. Sebelumnya, Komisi VI mendapat penjelasan dari Plt. Dirut Angkasa Pura II Joko Murjatmodjo saat tiba di terminal 3. Terminal ini, jelas Joko, melayani penerbangan internasional dan domestik dengan 28 gates (10 gate internasional, 18 gate domestik).

Dalam proyeksinya, terminal ini akan memiliki kapasitas 25 juta penumpang per



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI meninjau Bandara Terminal Ultimate 3

tahun dengan mengusung *art and culture*. Beberapa mobil tak terpakai dihias dengan motif batik di tengah terminal. Terminal ini juga sudah dilengkapi dengan garbarata ganda, khusus untuk melayani pesawat super jumbo seperti Airbus 380. Dan ada 5 lantai di terminal ini. Lantai 1 untuk kedatangan, lantai 2 keberangkatan, dan sisanya untuk lounge serta perkantoran.

Delegasi Komisi VI mengelilingi hampir semua sudut terminal ini. Sesekali mereka

juga melihat toilet, mushala, dan berbincang dengan para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan. Joko juga menjelaskan, di Terminal 3 tidak ada layanan vorter, karena kerap mengganggu penumpang. Namun, trolley tetap disediakan dengan jumlah yang memadai. Bangunan terminal yang menempati luas 422.804,40 m<sup>2</sup> ini, menggunakan tenaga listrik 65 MW.

"Kami dari Komisi VI menginginkan Terminal 3 jadi kebanggaan setelah Terminal 1 dan 2 sudah sangat penuh. Ketika Terminal 3 diresmikan, kita punya harapan yang begitu tinggi bahwa ini adalah terminal masa depan kita. Meskipun kami juga mendapat banyak temuan tentang kekurangan-kekurangan yang harus dikejar Angkasa Pura 2 sebagai pengelola. Misalnya, antara kendaraan umum dan pribadi masih bentrok, sehingga terjadi kemacetan," ungkap Teguh Juwarno. ■

(mb), Foto: Jakumir

terakhir, terjadi pengurangan 200 ribu orang yang bekerja di sektor pertanian. Sektor yang seharusnya produktif.

"Kemudian, keadaan sosial ekonomi rakyat malah makin nyungsep: gini ratio bertambah, kemiskinan mencapai 28 juta orang," ungkap Heri.

Menurutnya utang ditarik hanya untuk membayar bunga utang. Pada RAPBN 2017, posisi keseimbangan primer sudah mencapai defisit Rp 111,4 triliun. Ini menjadi tanda, bahwa utang yang ditumpuk tidak produktif. Hanya untuk membayar bunga utang saja. "Istilahnya gali lobang, tutup lobang," ketusnya.

Bagi Heri dengan pola semacam itu, tidak ada penjelasan lain bahwa utang yang ditarik punya dampak yang berbahaya. Kalau dibagi rata ke 250 juta penduduk Indonesia, maka masing-masing menanggung sekitar Rp16 juta, termasuk bayi yang baru lahir.

"Tragis dan kasihan, baru lahir sudah

tidak mandiri. Hasilnya satu kita dicekik. Dibikin tidak mandiri," sesal Heri.

Politisi Gerindra ini menekan pemerintah agar memperhatikan sektor yang saat ini masih jadi "anak tiri" di antaranya sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan sebagai sektor strategis yang hingga detik ini menyumbang 15,4% atas PDB.

"Padahal, kita sudah banyak berutang, tapi dampaknya nihil. Sektor-sektor strategis tetap saja salah urus. Lemahnya SDM, investasi, teknologi. Sehingga produktifitasnya menurun. Padahal, tenaga kerja di sektor ini sangat dominan, di atas 50%," ungkapnya.

Oleh sebab itu, untuk mencegah meluasnya kerusakan APBN akibat utang. Heri mengajak semua pemangku kepentingan agar mengingatkan pemerintah agar tidak ceroboh dalam berutang.

"Maka kita perlu mengingatkan



Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan

pemerintah untuk berhati-hati soal utang. Mereka seharusnya sudah sadar bahwa APBN nasional sedang dibajak. Disusun secara serampangan dan tidak kredibel serta sarat kepentingan. Dan karena itu, seluruh kepentingan nasional terancam," ujar Heri. ■

(cha.mp), Foto: Arifjfk

## DPR RI Nilai Angkasa Pura I Lalai Kelola Aset

Komisi V DPR RI menilai musibah kebakaran di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar sebagai akibat lalainya PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam mengelola aset. Pasalnya, Angkasa Pura I membiarkan bandara lama ini dalam keadaan kosong dan tidak berfungsi.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis usai pertemuan dengan Presiden Direktur Angkasa Pura I (Persero) Sulityo Wimbo Hardjito dan jajarannya dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Jumat (26/8)

Sebagaimana diketahui, Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar mengalami kebakaran pada tanggal 15 Agustus 2016 lalu yang menghanguskan terminal penumpangnya.

Menurut Djemi, salah satu alasan yang mendorong Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ini adalah untuk memantau aset Angkasa Pura I di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, pasca kebakaran yang terjadi di sana.

"Kami minta Angkasa Pura I



*Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Bandara Lama Makassar*

melakukan pengelolaan aset dengan baik dan tidak membiarkannya terbengkalai" tegas politisi Gerindra itu.

Selanjutnya, Fary juga menegaskan, bahwa carut marut kendaraan di kawasan bandara dan kebersihannya, merupakan salah satu poin penting yang juga harus dibenahi management Angkasa Pura I.

"Keluhan masyarakat terkait kebersihan di kawasan dan dalam lokasi Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros hingga pengaturan carut-marut kendaraan harus segera dibenahi, sehingga hak seharusnya didapat para pengguna jasa bandara di Makassar bisa terealisasi," pungkasnya.

Selain membicarakan masalah kebakaran bandara, Komisi V DPR RI dalam pertemuan tersebut juga membicarakan masalah pembebasan lahan bandara yang dianggap Komisi V DPR RI masih bermasalah. Terkait masalah pembebasan lahan ini, Legislator Senayan ini mendesak pihak Angkasa Pura I untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Masalah pembebasan lahan merupakan salah satu poin dari beberapa poin yang menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan Angkasa Pura I", tegasnya.

Turut serta dalam Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI antara lain Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia, Anggota Komisi V Rendy Lamadjido, Hamka B. Kady, Ade Rezki Pratama, Rita Zahara, Agung Budi Santoso, Bahrum Daido, Fatmawati Rusdi, Sahat Silaban, dan Capt. Djoni Rolindiawan. ■

*(su), foto: suciati/bh*

## Panja SDGs BKSAP Berbagi Pengalaman pada Workshop GOPAC

Anggota BKSAP DPR RI Siti Masrifah menyampaikan paparan Panja SDGs BKSAP pada GOPAC Workshop Development Effectiveness to Implement the SDGs yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/8).

"Kita dari parlemen Indonesia diminta untuk membagikan pengalaman sebagai anggota Panja SDGs. Ada beberapa hal yang kita sampaikan di dalam forum ini khususnya mengenai hasil rekomendasi dari panja SDGs," ujar Masrifah.

Ia juga menyampaikan, hal ini

bertujuan agar parlemen-parlemen yang hadir dapat mengetahui bahwa Panja SDGs bisa membuat rekomendasi penguatan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini.

"Ini akan kita sosialisasikan, memang selama ini ada beberapa kendala karena ternyata SDGs ini belum familiar baik di

kalangan anggota parlemen sendiri, pemerintah, maupun di masyarakat luas. Sehingga perlu kerja keras dari seluruh stakeholder yang ada untuk mensosialisasikan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya," papar Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Kedepan ia berharap agar pola berfikirnya tidak hanya secara parsial agar program itu dapat berjalan secara terus menerus.



Anggota BKSAP DPR RI Siti Masrifah

"Ada dua hal terpenting dari 17 goals yang ada di SDGs ini, diantaranya tentang kemiskinan dan kesehatan yang akan kita tekankan. Tetapi sesungguhnya dari dua hal itu ada banyak turunannya yang harus kita dorong.

DPR RI sesungguhnya mempunyai posisi yang kuat untuk memperjuangkan baik dari segi anggaran, legislasi maupun pengawasan terhadap apa yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini," tuturnya.

Selain bertujuan mencari ilmu di negara sendiri atau berkunjung ke beberapa

wilayah yang ada di Indonesia, lanjutnya, Panja SDGs juga melakukan kunjungan ke beberapa negara lain untuk mendiskusikan mengenai *grand design* untuk tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Sehingga ke depannya bisa diterapkan secara nasional dan internasional, dan hasilnya bisa dimanfaatkan.

"Kalau di parlemen kita, kelebihannya adalah anggota Panja ini diambil dari Anggota BKSAP. Itu menjadi kekuatan bagi panja, karena anggota BKSAP itu diambil dari berbagai komisi dan fraksi, sehingga kemudian masing-masing bisa mendorong di komisinya masing-masing. Soal kemiskinan dan kesehatan bisa dibahas di komisi IX dan kebetulan saya di sana, jadi bisa di *push* masalah anggarannya agar tercapai tujuan pembangunannya," ungkapnya. ■

(dep) Foto: Nafarajimr

## DPR RI Terus Perkuat Lembaga Menuju Parlemen Modern

Di usianya yang ke 71 tahun, DPR RI terus membangun dan memperkuat kelembagaannya menuju parlemen modern. Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany usai pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati HUT DPR RI ke-71 Tahun di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/8).

“ Kita senang DPR RI berusia 71 tahun, dari periode ke periode keanggotaan dewan itu berganti. Di usianya yang tidak muda lagi, DPR RI akan terus berproses, membangun, dan menguatkan kelembagaannya menuju parlemen yang modern,” ungkap Win, sapaan akrabnya.

Dia juga menjelaskan, terdapat beberapa indikator menuju parlemen modern diantaranya representasi. Menurutnya, kehadiran anggota dewan harus dirasakan betul oleh konstituennya. "Sebagai pendukung, ini merupakan tantangan sekaligus kewajiban kami, bagaimana membangun DPR RI ini sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Selanjutnya, melakukan penguatan kelembagaan melalui sistem transparansi dengan memanfaatkan aplikasi berbasis

teknologi informasi yang ada sehingga masyarakat dengan mudah bisa mengakses kinerja dewan.

"Masyarakat kita sudah makin cerdas, makin kritis, banyak yang menyampaikan inspirasi dengan berbagai instrument yang ada. Kita siapkan melalui elektronik, sms pengaduan dan itu dimanfaatkan betul oleh masyarakat dan tahun ini saja sudah 4300 aspirasi yang kami terima. Luar biasa dan tentu harus direspon oleh DPR RI," jelas Win

Selain itu, ditegaskan Win, pembenahan struktural maupun kultural tidak hanya di dalam para anggota dewan saja, tetapi juga pada lingkungan Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung akan terus menggalakkan reformasi birokrasi.

"Sudah banyak sekali kemajuan yang kita lakukan dan kami akan tetap konsisten



Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

menjalankan reformasi birokrasi," imbuh Win.

Dalam upacara peringatan hari jadi DPR RI tersebut, Win memberikan penghargaan Satyalencana Karya Satya kepada 177 pegawai dan memberikan piagam penghargaan kepada 4 pegawai teladan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Selain itu, Win juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba mewarnai anak-anak dalam rangkaian pesta rakyat DPR RI 2016. ■

(anso), Foto: Arifimr

## Target BRG 30 persen Tapi Dana APBN Belum Turun

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Restorasi Gambut (BRG) wajib menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut untuk jangka waktu lima tahun seluas kurang lebih 2 juta hektar. Dengan target pencapaian pada tahun 2016 sebesar 30 persen.

Oleh karena itu Komisi IV meminta penjelasan kepada Kepala BRG terkait program kerja 2016 dan rencana kerja tahun 2017 secara mendetil pada saat rapat dengar pendapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi dengan Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (31/8).

"Target 30 persen dari 2 juta hektar yakni sekitar 600 ribu hektar, namun dengan dana yang belum turun dari APBN. Ini memang tugas berat buat pak Nazir Foead dan seluruh jajarannya," ujar politisi dari Fraksi PAN itu.

Sesuai Peraturan Presiden RI nomor 1/2016, BRG merupakan



Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi

lembaga nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, dengan tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Provinsi Papua.

"Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Badan Restorasi Gambut (BRG) menyelenggarakan beberapa fungsi yakni pelaksanaan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut, perencanaan pengendalian dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut, pemetaan kesatuan hidrologis gambut, penetapan zonasi fungsi pelindung dan fungsi budidaya, pelaksanaan konstruksi infrastruktur pembatasan gambut dan segala kelengkapannya, penataan ulang pengelolaan area gambut terbakar, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut, pelaksanaan supervisi dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur di lahan konsesi," jelasnya. ■

(dep.mp) Foto: Nefitro/jk



Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo

## RUU Karantina Hewan Akan Diintegrasikan dengan RUU Kekarantinaan Kesehatan

Badan Legislatif (Baleg) DPR RI berencana untuk mengintegrasikan RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang merupakan inisiatif DPR RI dengan RUU Kekarantinaan Kesehatan usulan pemerintah. Kedua RUU tersebut dinilai memiliki substansi objek yang sama, yaitu mengatur pengamanan di kawasan pintu masuk.

"Kedua RUU muncul bersamaan di Prolegnas. Setelah kita pelajari dan dalam, ternyata substansinya sama. Nah, kalau objeknya sama kenapa tidak diintegrasikan saja," ungkap Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo dalam Pleno Baleg saat membahas Kompilasi DIM

## Pemerintah Harus Tingkatkan Kualitas Perpustakaan Sekolah Negeri

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, HAR Sutan Adil Hendra mengatakan pemerintah harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan literasi (perpustakaan-red) yang ada pada sekolah-sekolah negeri bisa lebih baik dari sekolah swasta.

“ Sekolah-sekolah negeri sebenarnya APBD dan APBN kan sudah hadir disitu. Tentu ini ada yang harus kita (DPR RI-red) soroti, harus ada evaluasi dalam bentuk pengawasan bagaimana sekolah-sekolah negeri untuk mendapatkan perpustakaan yang berkualitas” ujarnya kepada Parleментарia saat melakukan peninjauan ke Perpustakaan sekolah SMA Muhammadiyah I Provinsi DIY, Jumat (26/8) dalam rangka kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi DIY.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan kunjungannya ke perpustakaan SMA Muhammadiyah I Yogyakarta melihat suatu langkah maju di dalam peningkatan perpustakaan, meski langkah maju itu didapat dari sekolah swasta seperti SMA Muhammadiyah I Yogyakarta yang telah mendapat akreditasi A dalam pengelolaan perpustakaan.

Hal ini harusnya menjadi motivasi kepada perpustakaan-perpustakaan lain terutama perpustakaan yang dikelola di sekolah-sekolah negeri,” ujar Sutan Adil



*Tim Kunspek Komisi X DPR RI meninjau perpustakaan SMA Muhammadiyah I DIY*

Hendra yang juga sebagai Ketua Tim Rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi DIY.

Ia juga mengapresiasi perpustakaan di sekolah tersebut memiliki tempat-tempat yang tidak dimiliki oleh perpustakaan sekolah-sekolah lain misalnya adanya fasilitas *home mini theatre* dalam perpustakaan.

"Kita juga melihat di sini memang ditata dengan baik, rak bukunya pun bagus, terus ruangnya juga bagus. Ini, kan, sarana bagaimana meningkatkan daya serap dan daya tampung untuk buku, dan sekaligus buku ini kan juga gudang ilmu," ujarnya.

Fraksi-Fraksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/8).

Namun, sambung politisi Fraksi Hanura itu, untuk menyatukan kedua RUU bukanlah hal yang mudah. Sebab, ada beberapa substansi yang sulit untuk digabungkan karena adanya perbedaan latar belakang.

"Secara teknis masih agak berat karena beberapa substansinya tidak bisa bertemu. Tetapi, objek dan mekanisme kerjanya bisa disamakan. Kita juga berharap terbentuknya Badan Karantina Nasional, sebagai solusi sehingga tidak tumpang tindih," sambung Dossy.

Menurutnya, dengan pembentukan Badan Karantina Nasional (BKN) dapat mengisi kekosongan hukum

dalam merespon perkembangan virus atau bio terrorism yang bisa melalui pelabuhan, bandar udara, maupun daerah perbatasan.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Baleg lainnya, Firman Soebagyo (F-PG) menilai BKN merupakan hal yang sangat fundamental sebagai alur masuk maupun keluar untuk menjaga kelestarian plasma nutfah.

"Hari ini varietas kita sudah banyak dicuri, sehingga diharapkan ke depan pembentukan BKN akan menjadi ujung tombak dari berbagai persoalan yang terkait dengan pertahanan nasional," imbuhnya. ■

Ia juga menegaskan bahwa literasi ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan, bagaimana untuk terus didorong minat agar bisa terus ditingkatkan. "Karena kita sedih, dari 61 negara yang dilakukan survei, Indonesia berada di dalam peringkat 60 minat membacanya. Tentu ini kita harus mengevaluasi, apa persoalannya, salah satu kita temukan, sarana-prasarananya. Lalu kita temukan lagi kesejahteraan dari pustakawan itu artinya sarana-prasarana SDM ini harus terus ditingkatkan kalau kita mau menjadi bangsa yang bermartabat," tegasnya.

Seperti diketahui, agenda kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke Provinsi DIY, selain peninjauan ke sekolah SMA Muhammadiyah I Provinsi DIY, Komisi X DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Pemprov DIY serta pertemuan dengan pustakawan Badan Perpustakaan Kabupaten Gunung Kidul, Komunitas Baca Provinsi DIY, Pemerhati Perpustakaan dan Minat Baca Provinsi DIY dan tokoh-tokoh masyarakat di bidang perpustakaan. Komisi X DPR RI juga melakukan peninjauan lapangan bidang perpustakaan daerah di Desa Hargo Mulyo, Kulon Progo, Provinsi DIY.

Adapun rombongan Komisi X DPR RI yang ikut dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi DIY, adalah; My Esti Wijayati (F-PDIP), Sofyan Tan (F-PDIP), SB Wiryanti Sukamdani (F-PDIP), HA Mujib Rohmat (F-Partai Golkar), Noor Achmad (F-Partai Golkar), HM Ridwan Hisjam (F-Partai Golkar), Jamal Mirdad (F-Partai Gerindra), Nuroji (F-Partai Gerindra), Rinto Subekti (F-Partai Demokrat), Jefirston R Riwu Kore (F-Partai Demokrat), Laila Istiana DS (F-PAN), Yayuk Basuki (F-PAN), KH Surahman Hidayat (F-PKS), Mustafa Kamal (F-PKS) H Dony Ahmad Munir (F-PPP), Dadang Rusdiana (F-Hanura), Yayuk Sri Rahayuningsih (F-Partai Nasdem). ■

## Perayaan HUT DPR RI Libatkan Peran Masyarakat

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menegaskan bahwa perayaan HUT DPR RI ke 71 melibatkan peran aktif masyarakat. Hal itu diungkapkannya saat memberikan sambutan pada pembukaan pameran seni rupa yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal DPR RI di Ruang Pustakaloka, Gedung DPR RI, Senayan Jakarta pada Senin, (29/8).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT RI dan HUT DPR RI ke 71. Kami meneruskan gagasan Pimpinan DPR RI bahwa HUT DPR RI harus dalam rangkaian yg menyertakan sebanyak partisipasi aktif masyarakat," ujar Win, sapaan akrabnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih atas partisipasi seniman yang bersedia memamerkan hasil karyanya. "Seniman yang berkesempatan memamerkan atau menyajikan karyanya, kami ucapkan terima kasih," sambungnya.

Win juga menegaskan bahwa



Suasana acara pembukaan Pameran Lukisan memperingati HUT DPR RI ke-71

kegiatan ini adalah upaya DPR RI dalam memberikan apresiasi terhadap budaya bangsa Indonesia. "Ini merupakan bentuk apresiasi DPR RI terhadap seni budaya bangsa Indonesia," terangnya.

"Tujuan kegiatan pameran ini adalah untuk membangun apresiasi seni melalui rumah rakyat sehingga teman-teman bisa ikut menyampaikan karyanya, karena itu merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia," sambung Win.

Peserta dalam pameran seni rupa ini berjumlah 17 seniman profesional yakni Agussugih, Amrus Natalsya, Basrizal Albara, Edo Pillu, Firdaus Alahudi, Ibrahim, Idran Wakidi, Nasirun, Risman

Marah, Rudi Hendriatno, Soenarto PR, Sulebar, M. Soekarman, Taufik Ermas, Yoes Rizal, dan Yunizar. Pameran seni rupa ini berlangsung dari 29 Agustus hingga 2 September 2016. ■

(Asmp) Foto: Azka/Inr

## Komisi V Dorong Pembangunan Waduk Bener, Purworejo

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Michael Waitimenna mendorong pembangunan waduk bener, Kabupaten Purworejo Jawa tengah. Hal tersebut diungkapkannya saat pertemuan dengan Bupati Purworejo, Agus Bastian dan jajarannya di Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (26/8).

“Tadi kami sempat mendapat masukan dari bupati agar komisi V memperjuangkan pembangunan waduk Bener di Purworejo. Dan melihat manfaat waduk kami dari Komisi V tidak hanya mendukung tapi juga mendorong percepatan pembangunan waduk tersebut,” ujar Michael.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa waduk tersebut sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan masyarakat Purworejo dan sekitarnya,



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Waduk Bener di Purworejo

seperti irigasi yang akan mengairi sawah-sawah di Kabupaten Purworejo dan

sekitarnya. Selain itu waduk juga dapat berfungsi sebagai suplai air baku untuk keperluan rumah tangga. Waduk Bener juga akan digunakan untuk PLTA (Pembangkit listrik tenaga air).

Namun karena proyek tersebut merupakan pembangunan *multiyears*, maka hal tersebut dilakukan secara bertahap. Meski demikian Michael berharap agar pembangunan waduk ini dapat segera diselesaikan, tentunya dengan dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Ditjen Sumber Daya Air. ■

(Ayu) Foto: Ayu/br



Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Pembangunan Bendungan Pasilaga di Palu

## Komisi V Dukung Pembangunan Bendungan Pasilaga, Sulteng

Krisis air bersih masih terjadi problem penting di sejumlah daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah apabila musim kemarau tiba. Dampak dari krisis air juga dirasakan para petani setempat, dan untuk sementara mereka belum dapat menggarap lahan pertanian karena kesulitan air. Oleh karena itu Kementrian PU-PR berencana membangun sejumlah bendungan maupun pemasangan pipanisasi di wilayah Kabupaten Sigi untuk mengatasi krisis air bersih tersebut.

“Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya proyek pembangunan bendungan air bersih ini demi kepentingan masyarakat yang nantinya akan dialiri air bersih ini,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said kepada pers di sela-sela meninjau lokasi proyek pembangunan bendungan Pasigala (Palu-Sigi-Donggala) di Desa Saluki Kabupaten Sigi, Jum'at (26/08).

Menurut politisi Partai Golkar, ini suatu proyek raksasa yang begitu besar dengan kapasitas yang sangat luar biasa dan bendungan Pasigala diperkirakan untuk membawa debit air bersih sebesar 600-700 liter/detik yang dimanfaatkan untuk disuplai ketiga kabupaten (Sigi-Kota Palu-Donggala).

Proyek ini tahap I memakan biaya kurang lebih Rp 200 Miliar, dan untuk tahap II nanti diperkirakan kurang lebih Rp 400 Miliar. "Jadi ini suatu proyek raksasa yang begitu besar

yang penyelesaiannya sampai 2019," tegas Muhidin.

Politisi asal Dapil Sulteng menegaskan bahwa Komisi V memberikan dukungan untuk membantu Pemda merealisasikan seluruh program-program yang telah dicanangkan secara nasional, baik yang menyangkut masalah air baku dan air bersih sampai dengan bagaimana menormalisasikan sungai yang ada itu.

Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PU-PR, Dwi Sugianto, menjelaskan bendungan Pasilaga ini menampung debit air baku 600 liter/detik, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiga wilayah yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Air dari bendungan Pasilaga ini kemudian akan melewati pipa dan ditampung di penampungan air di Desa Oloboju untuk dikelola menjadi air bersih.

"Kapasitas bendungan Pasilaga untuk memproduksi debit air baku sebanyak 600 liter/detik. Bendungan Pasilaga ini merupakan bendungan kedua dari *news script system* penyediaan air minum (spam) regional luar Jawa dan Banjar Bakula," jelasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata berharap Kementerian PU-PR segera menyelesaikan pembangunan bendungan Pasigala ini agar masyarakat bisa lebih cepat menikmati air bersih. "Saya berharap proyek ini secepatnya selesai. Selain itu di daerah kami ada tiga daerah aliran sungai, sehingga itu bisa dikelola dan bisa dinikmati masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian dan perkebunan," pungkasnya. ■

(su). Foto: Iwam/ik

# JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344  
@dpr\_ri DPR RI @DPR\_RI DPR RI



Pimpinan DPR RI membuka pameran foto Warna-Warni Parlemen yang mengusung tema "Menuju Parlemen Modern" di Komplek Parlemen Senayan, Senin (29/8).  
*Foto: Odjie, Jaka*

Pimpinan DPR RI memotong nasi tumpeng dalam rangka memperingati HUT DPR RI ke-71 bersama para mantan Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Lembaga Negara lainnya di Gedung Paripurna DPR RI, Senin (29/8).  
*Foto: Arief, Andri*



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menutup rangkaian acara *Workshop Development Effectiveness to Implement the Sustainable Development Goals (SDGs)* yang diselenggarakan GOPAC di Jakarta, Rabu (31/8).  
*Foto: Naefuroji*